

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

### Buku

- A Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada, 2018.
- Asep, Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Haryoko, Spto dkk, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*, Makasar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Indrati, Marida Farida S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2014.
- Jalani, Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Katharina, Riris, *Pelayanan Publik & Pemerintahan Digital Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002.
- Manulang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mujar, Ibnu.Syarif, *Fiqih Siyasah doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016).
- Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rauf, Rahyunir, M. Si, Yusri Munaf, SH, M. Hum., *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*, Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015.
- Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan*

*Kepemerintahan yang baik*), Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.

Siyoto, Sandu and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi media publishing, 2015.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Hukum Tata Negara*, Jakarta Pusat: UI Press, 2011.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 203.

Sumardi, I Nyoman, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama, 2010.

Supriyatno, Budi, *Manajemen Pemerintahan Plus Dua Belas Langkah Strategis*, Media Brilian, 2009.

Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif, Pendekatan*, Prenada Media, 2015.

Waluyo, Suko, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Jakarta: Faza Media, 2006.

### Skripsi

Adyatmadani Rifki, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Bappeda di Kabupaten Pesisir Barat (Studi Di Bappeda Kabupaten Pesisir Barat)." *diploma*, Uin Raden Intan Lampung, 2023.

Amarta, Riko Yosefin, "Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals (SDGS) Di Tingkat Desa (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan Nasional Di Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)." *Thesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 2022.

Annisa, Nurul, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kota ParePare Perspektif Siyasah Dusturiyah: Telaah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Thesis*, IAIN parepare, 2021.

Armedi, Mahmud, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kepemimpinan Dalam Islam dan Pemikiran Politik Al Mawardi." *Skripsi*, Uin Raden Intan Lampung, 2022

Destiani, Yolanda Rama, "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)." *diploma*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Eni, Marlina, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)." *Undergraduate*, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Irvan, Zulfahmi, "Implementasi Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)." *Thesis*, Universitas

Muhammadiyah Mataram, 2022.

Nursamsiyah, "Pendampingan Pemerintah Desa Oleh Lembaga Strategi Nasional Sebagai LSM Dalam Pengembangan Desa Wisata." *Thesis*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2022.

Pangestu, Agung Dwi Rahmana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip GoodGovernance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018.

Putri, Devina Pramudita, "Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Untuk Menunjang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Cirebon." *Thesis*, Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Riska, Afrianti, "Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pelaksanaan Perda Provinsi Lampung No 05 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang (Studi Di Dinas Perhubungan Lampung Utara)." *Diploma*, Uin Raden Intan Lampung, 2023.

S. T. Setiarto, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Balai Jasa Konstruksi-Dpu Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah." *Thesis*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2020.

Septian, Rendi, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Studi Kasus Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan)." *Thesis*, Universitas Bangka Belitung, 2017.

Utari, Dea Fanny, "Analisis Fiqih Siyasah Mengenai Negara Hukum Pancasila" *Undergraduate*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Yulianto, Gani, "Analisis Peran Inspektorat Daerah Dalam Membangun Good Corporate Governance Terhadap Pengoptimalan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa." *Thesis*, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, 2021.

## **Jurnal**

Ardianto, Sema, "Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 17:1 (Juni 2023): 36–45.

Bambang Munas Dwiyanto "Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan" *Ekonomi Pembangunan* 12: 2 (Desember 2011): 244.

Fahmi, Mutiara, "Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)* 2 (2017): 33.

Fasa, Achmad Saeful, Ina Revayanti, and Benny Wijaya, "Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Air Bersih Domestik di Kabupaten Cirebon," *Geoplanart*

4:2 (February 2023): 104–115.

Hoessein, Bhenyamin et al., “Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Daerah,” *Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah Dan Kota, FISIP-Universitas Indonesia*, 2005): 65.

Holilah, Muchammad Ismail, "Model Komunikasi Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan (Studi berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD)" *Indonesian Journal of Political Studies* 3:2 (November 2023): 150-175.

Jafar, Wahyu Abdul, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqih Siyash Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah,” *Al-Imarah* 4: 1 (Agustustus 2019): 83.

Kaehe, Diradimalata, Joorie Marhaen Ruru, Welson RompaS, " Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara" *Jurnal Administrasi Publik* 5:20 (2019): 20.

Kemiskinan Pada Masyarakat Desa Sofan Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education* 30:6 (2021): 267.

Lubis, Asri “Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan” *Tabularasa Pps Unimed* 6:2 (Desember 2009): 182.

M Edwar Rinaldo, Hervin Yoki Pradikta, " Analisis Fiqh Siyash Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1: 1 (2021): 63-84.

Muhaemin, Nina Minawati, “Bonus Demografi Jawa Barat Dan Perencanaan Pembangunan Daerah: Sudah Siapkah Jawa Barat,” *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 4:1 (February 2021): 201–222.

Munawar, Marzuki Marzuki, and Ibnu Affan, “Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ilmiah Metadata* 3:2 (September 2021): 452–468.

Nasution, Ali Imran, “Keabsahan Peraturan Daerah Memasukkan Peraturan Bersama Menteri sebagai Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah” *Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 9: 2 (Agustus 2020): 284-303.

Nopliardy, Rakhmat, Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah Dan Implikasi Dibatakannya Peraturan Daerah Bagi Program Legislasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota. *Jurnal Al"Adl*, IX : 1 (April 2017): 92.

Riskiyono, Joko, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 6:2 (2015): 159-176.

Stiglitz, J "The World Bank at the millennium" *Economic Journal* 109 (1999): 577-97.

## Website

- A. Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” <https://jdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/958455pembentukan-peraturan-daerah.pdf> (diakses pada tanggal 29 Februari 2024).
- Bapedda, “Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021” <https://dkpp.jabarprov.go.id/berkas/download/9c37d027d25ab4f69b1fb07c395906e6.pdf> (diakses pada tanggal 29 Februari 2024).
- Bapennas, “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” <https://jdih.bapenas.go.id/peraturan/detailperaturan/60> (diakses pada tanggal 29 februari 2024).
- Dewan, Perwakilan Daerah <https://www.dprdirebonkab.go.id> (diakses pada tanggal 29 Februari 2024).
- Kreator, Publikasi “Kendalikan Inflasi dan Dampak El Nino, Pemkab Cirebon Gelar Gerakan Pangan Murah” <https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/08/kendalikan-inflasi-dan-dampak-el-nino-pemkab-cirebon-gelar-gerakan-pangan-murah> (diakses pada tanggal 29 Februari 2024).
- Lambang dan Identitas • Portal Pemerintah Kabupaten Cirebon <https://www.cirebonkab.go.id/pages/2022/lambang-dan-identitas> (diakses pada tanggal 29 Februari 2024).
- Pt. Putra Citra Sejahtera 2, Peraturan Daerah Kota Cirebon Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian” [https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi\\_download/32.74/NA-2022\\_1016.pdf](https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/32.74/NA-2022_1016.pdf) (diakses pada tanggal 2 Februari 2024).
- Sekretariat Jenderal, “BK DPR Sarankan DPRD Banyuwangi Masukkan Peran DPRD dalam Raperda” <https://dpr.go.id/berita/detail/id/23717/t/javascript> (diakses pada tanggal 29 Februari 2024).

## Undang-Undang

- Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
- Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Pasal 2 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

R. Indonesia. Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (Jakarta, 2014).

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun* (2011).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, jakarta: Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, 2005.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Rahmat Ariefudin selaku Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pada 14 Maret 2023.

Wawancara dengan Bapak Khanafi selaku wakil ketua BAPEMPERDA DPRD KAB. Cirebon pada tanggal 8 April 2024.